

**EFEKTIFITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15
TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERKAIT PENDAFTARAN
SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Agung Christduta Rahedi (0810110004)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

ABSTRAK

AGUNG CHRISTDUTA RAHEDI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2012, Efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Lutfi Effendi,SH.M.Hum; Sri Kustina,SH.CN

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. Serta penulis juga membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menerapkan peraturan tersebut dan upaya yang telah dilakukan oleh dinas tersebut guna mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan memberikan kuisioner terhadap sample yang merupakan mahasiswa pendatang dan studi kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini sejumlah sebelas (11) orang terdiri dari 1 staff bidang administrasi yang menangani pelaksanaa Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Mahasiswa pendatang yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Brawijaya sebanyak 5 orang dan Mahasiswa Universitas Merdeka Malang sebanyak 5 orang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan daerah Kota Malang mengenai surat keterangan tinggal sementara tidak berjalan efektif karena beberapa faktor baik dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, Kesadaran Hukum Warga Masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh dinas terkait berupa ketidaksadaran masyarakat khususnya mahasiswa dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi oleh dinas kependudukan guna memaksimalkan pelaksanaan aturan ini. Solusi dari kendala tersebut adalah pemaksimalan sosialisasi dan penggunaan e-ktp(elektronik Kartu Tanda Penduduk) guna mempermudah data yang didapat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pasal 9 Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara dikatakan tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk disosialisasikan ke warga pendatang sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif. Juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dinas terkait mengenai sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dan beberapa solusi yang diambil atas beberapa kendala diatas.

ABSTRACT

AGUNG CHRISTDUTA RAHEDI, Administrative Law, Law Faculty Brawijaya University, November 2012, effective of regulation territory Malang city about certificate of temporary resident specifically for newcomer university student in Malang City. (Study at departement of demography and civil registration) Lutfi Effendi,SH.M.Hum; Sri Kustina,SH.CN

Main topic of thesis is about effective of regulation territory Malang city about certificate of temporary resident specifically for newcomer university student in Malang City. It also studying about obstacle face departement of demography and civil registration when the departement operate this regulation and efforts this obstacle.

This research using method sosiologic juridical. It means approach the problem with examine function of regulation. The location to do research is at departement of demography and civil registration Malang City. Kind of data what the writer took is primary data and secondary data with method obsevation, interview and give quisonere for the sample what it takes sampel university student in Malang specifically for newcomer. Quantity of this sample is eleven people it consist of 1 staff of departement of demography and civil registration and 5 university student from brawijaya university, and 5 university student from merdeka university of malang.

Base on result from this research, writer take the answer of the problem at the first paragraph, it says the regulation is not work effectively because several factor, it consist factor of the regulation, law instrumen, facility and awareness of public. The obstacle what it face departement of demography and civil registration it like awareness of public specifically for newcomer university student in Malang, the minimum of number socialization. efforts to face the obstacle is using electronic sign civil to make easier than before.

Base on result from this research, writer take the conclusion about that. The regulation is not work effective because awareness of public, and the minimum of number socialization and every leader in sociality to have a role to maximize the regulation to give definiton and explanation of this regulation. Efforts that it take is using electronic sign civil to make easier than before.

A. Pendahuluan

Kota Malang, dihuni oleh lebih dari 700 ribu penduduk, yang 70 persennya adalah pendatang. Malang dengan berbagai potensinya telah menjadi kota yang cukup dinamis, penduduknya yang kian bertambah, membuat kota Malang semakin padat dari tahun ke tahun. Malang sebagai kota pendidikan, membuatnya didatangi ribuan penduduk baru tiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan semakin meningkatnya daya tampung tiap-tiap institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya akan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas. Hal ini nampak pada kemacetan di beberapa ruas jalan terutama di sekitar wilayah yang dekat dengan kampus, seperti Soekarno Hatta, jalan Veteran, dan beberapa ruas jalan lainnya. Semakin banyak penduduk juga akan berdampak pada semakin banyaknya masalah. Baik yang ditimbulkan oleh aktivitas penduduk, maupun dampak aktivitas ekonomi. Kepadatan ini juga berimbas pada sektor usaha. Dapat kita lihat dengan semakin banyaknya tempat jajanan, warnet, ruko, dan mall.

Kota Malang juga dikenal sebagai *Kota Pendidikan*, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar Malang yang kemudian menetap di Malang, terutama dari wilayah Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, bahkan Berdasarkan jumlah Perguruan Tinggi yang telah disebutkan di atas, sehingga secara tidak langsung Kota Malang menjadi Kota

tujuan yang sangat menjanjikan bagi kaum urban atau kaum pendatang yang ingin mendirikan usaha atau menempuh pendidikan. Hal ini sering dianggap remeh dan tidak menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Malang. Informasi kependudukan memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena data administrasi penduduk merupakan aset bangsa atau pemerintah daerah sebagai dasar/landasan perencanaan kegiatan pembangunan. Sehingga pengelolaannya perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mendukung terjadinya pengelolaan administrasi seperti itu perlunya ada keseimbangan agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Urbanisasi merupakan bagian permasalahan yang dapat di kaji berdasarkan pendekatan good governance. Permasalahan kependudukan yang terjadi di kota malang adalah keberadaan kaum urban yang tidak disiplin melaksanakan administrasi kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Keberadaan para pendatang tersebut tersebar merata di Kota Malang. Terkecuali pada daerah tertentu penduduk tersebut terfokus pada suatu tempat, diantaranya dipengaruhi Kota Malang sebagai potensi lapangan pekerjaan dan banyaknya kampus. dari luar negeri sekalipun.

Berdasarkan acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Kota Malang, diantaranya terdapat administrasi khusus kependudukan. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 para urban diharuskan memiliki *SKTS*

(Surat Keterangan Tinggal Sementara). Administrasinya pun tidak mahal hanya membutuhkan Rp. 5.000,00. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak diantara kaum urban yang tidak mengurus. Para pendatang lebih memilih untuk menggunakan identitas asalnya.

Adanya Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk para penduduk yang tinggal sementara di Kota Malang seharusnya didukung dengan sanksi administrasi agar peraturan tersebut dapat di patuhi atau di jalankan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini juga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dilakukan dengan tidak melaporkan atau mendaftarkan dirinya ke kepala lingkungan setempat atau ketua rukun tetangga setempat. Tetapi di mata anak kos atau mahasiswa yang tinggal sementara di kota Malang hal ini sering tidak dihiraukan karena dianggap tidak penting hal ini dapat dilihat dari jarang nya ada anak kos atau mahasiswa yang mendaftarkan data dirinya guna mendapat surat keterangan tinggal sementara. Ini disebabkan banyak anak kos atau orang pendatang yang tidak mengetahui adanya Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007. Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya sanksi apabila para pendatang tidak melaporkan datanya menyebabkan kejadian ini menjadi kebiasaan dalam Masyarakat. Peran aktif rukun tetangga dan masyarakat diperlukan guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti para pendatang tersebut buronan kriminal atau merupakan teroris yang dikejar oleh pihak kepolisian yang menyusup masuk ke Kota Malang guna melarikan diri dan sebagainya.

Kembali meninjau kenyataan yang terjadi di masyarakat pendatang diatas maka ada ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur kewajiban para pendatang khususnya mahasiswa pendatang dalam rangka pencatatan sipil guna data di dinas terkait mengenai Surat Keterangan Tinggal Sementara. Peraturan yang terkait erat dengan itu adalah Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara (das sollen) dengan fakta-fakta riil terkait dengan pelaksanaan peraturan di lapangan, lebih tepatnya ke Pendatang yang bertujuan menuntut ilmu di Kota Malang atau disebut Mahasiswa. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan ada permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu indikasi bahwa penerapan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara belum berjalan efektif.

B. Masalah

Dari pernyataan diatas dapat ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Malang dalam menerapkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang dan bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Penelitian ini mengkaji atau meneliti Warga Pendatang di Kota Malang khususnya yang tidak mempunyai surat keterangan tinggal sementara yang diatur dalam Peraturan daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007. Sehingga dapat kita ketahui apakah pelaksanaan surat keterangan tinggal sementara sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta kendala yang dihadapi oleh petugas Dispenduk dalam melaksanakan pembinaan terhadap permasalahan kependudukan tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan alasan bahwa Kota Malang merupakan Kota pendidikan dan banyak mahasiswa pendatang yang menimba ilmu atau menempuh studinya di Universitas yang terdapat di Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi pendatang di Kota Malang.

Teknik Pengumpulan Data diperoleh dengan cara Observasi, yaitu pengamatan di lapangan, dan wawancara dan memberikan kuisioner terhadap sampel dalam penelitian ini yang merupakan mahasiswa pendatang yang berada di Kota Malang dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian di Perpustakaan, Dokumen di lokasi penelitian dan penelusuran artikel yang didapat di internet.

D. Pembahasan

Bahwa agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu :

1. Kaidah hukum

Faktor yang pertama adalah kaidah hukum dalam hal ini mengenai pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara dan kaidah hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Masyarakat pada umumnya dan khusus bagi pendatang yang tinggal sementara di Kota Malang.

2. Penegak hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan mengeluarkan atau menerbitkan Surat keterangan tinggal sementara bagi masyarakat pendatang di Kota Malang.

3. Sarana atau fasilitas

Pelaksanaan pendaftaran dokumen kependudukan dalam hal ini Surat Keterangan Tinggal Sementara perlu adanya hal yang mendukung guna memaksimalkan pendaftaran dokumen kependudukan tersebut.

4. Kesadaran hukum warga masyarakat

Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menerapkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang berupa :

1. Kurangnya Kesadaran Mahasiswa untuk mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang ditujukan guna data untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kepentingan mahasiswa itu juga. Karena tidak semua Mahasiswa ingin memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) Kota Malang sehingga dengan SKTS maka dapat menjadi bukti atau data yang memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah.
2. Kurangnya Kesadaran Mahasiswa juga disebabkan sosialisasi yang tidak menyeluruh dan dari Kalangan Mahasiswa sendiri kurang paham dan terkesan malas mengurusnya karena belum memahami benar tentang SKTS(Surat Keterangan Tinggal Sementara)

Kendala-kendala di atas kerap kali muncul dan masih terjadi hingga saat ini, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku dinas yang memiliki kewenangan menerbitkan SKTS bagi pendatang di Kota Malang sudah menemukan Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah ada. Berikut upaya yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mengatasi kendala-kendala diatas :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pernah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai Tempat dan juga pernah mengajukan ke beberapa universitas guna mensosialisasikan adanya peraturan yagn mengharuskan mahasiswa yang tinggal enam(6) bulan berturut-turut untuk mengurus SKTS.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memaksimalkan Peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna mensosialisasi adanya peraturan tersebut. Sehingga tingkatan kesadaran Mahasiswa pendatang dapat naik.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerbitkan E-KTP(Electronic-Kartu Tanda Penduduk) yang memudahkan semua masyarakat mengakses atau mengurus semua urusan yang berkaitan dengan kependudukan dengan menggunakan E-KTP tersebut.

E. Penutup

a. Kesimpulan

Pasal 9 Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara dikatakan tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk disosialisasikan ke warga pendatang sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif.

b. Saran

Diharapkan untuk para aparatur untuk dapat lebih memahami tentang isi dari aturan perundang-undangan untuk lebih mudah dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat serta penambahan tenaga teknis untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang